



KEPEL
PRESS

Sejarah Pendidikan di Gorontalo

Hasanuddin

Fais

Mahyudin Damis

Samsi Pomalinggo

Burhanuddin Domili

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado

SEJARAH PENDIDIKAN DI GORONTALO

Hasanuddin

Fais

Mahyudin Damis

Samsi Pomalinggo

Burhanuddin Domili

KEPEL

Sejarah Pendidikan di Gorontalo

© Penulis

Hasanuddin

Fais

Mahyudin Damis

Samsi Pomalinggo

Burhanuddin Domili

Narasumber ahli : Drs. John Apriyanto, M.Hum

Disain sampul : Ninda Dian

Disain isi : Supriyadi

Cetakan pertama, Desember 2012

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Purwosari, Ringroad Utara,
Yogyakarta

Telp/faks : 0274-884500

Hp : 081 227 10912

e-mail : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI, Yogyakarta

ISBN : 978-602-9374-55-1

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Puji dan
Allah SWT,
dilimpahkan
dapat disele
Gagasan
timbul dari
mengalami
Islam. Mas
kemerdekaa
dinamis dar
menciptakar
munculnya

Banyak
dalam rang
beberapa ha
dilaksana
menyadari
hasil penel
Perkenanka
kepada ber
penelitian i

Sebagai
historiograf
para peme
tergerak un

adanya kerjasama kami mengucapkan sebagai Kepala Balai Alex. J Ulaen, DEA, engah kesibukannya kan penelitian ini; n waktunya untuk n semua pihak yang

ini persembahkan rhargaan dan terima nan dan kekurangan kami.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat	17
D. Tinjauan Pustaka	19
E. Pendekatan dan Kerangka Konseptual	23
F. Ruang Lingkup	31
G. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	32
H. Sistematika Pembahasan	35
 BAB II PENDIDIKAN TRADISIONAL	36
A. Masa Pra-Islam	36
B. Pengaruh Islam.....	41
 BAB III PENDIDIKAN MASA KOLONIAL BELANDA	50
A. Kegiatan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) ...	50
B. Politik Pemerintah Hindia Belanda.....	53
C. Politik Etis	56
D. Perkembangan Pendidikan	58
E. Peranan Organisasi Pergerakan dan Keagamaan	74

F. Peranan Persuratkabaran	83
 BAB IV MASA PENDUDUKAN JEPANG.....	86
A. <i>Awal Pendudukan Jepang</i>	86
B. Sistem Pendidikan	91
C. Kegiatan Pendidikan Sekolah Islam	99
 BAB V PENDIDIKAN PASCA KEMERDEKAAN	102
A. Berita Kemerdekaan dan Dinamika Pemerintahan ...	102
B. Dinamika Sistem Pendidikan	108
C. Perluasan Sistem Pendidikan	116
D. Kurikulum Sekolah	127
E. Mahasiswa di Rantau dan HPMIG	129
F. Sekolah Menengah Terpadu	134
1. MAN Insan Cendikia	134
2. SMAT Wira Bhakti	137
G. Pondok Pesantren	138
1. Pesantren Hidayatullah	138
2. Pesantren Alkhairaat	140
3. Pesantren Salafiyah Safi'iyah	143
4. Pesantren Hubulo	144
5. Pesantren Al-Falah Limboto	146
H. Perguruan Tinggi	147
1. Universitas Negeri Gorontalo	147
2. IAIN Sultan Amai Gorontalo	151
3. Universitas Gorontalo	154
 BAB VI PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN-LAMPIRAN	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan di Gorontalo telah membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat. Pendidikan telah mengantarkan masyarakat Gorontalo dari kegelapan menjadi dunia yang terang benderang. Gorontalo yang dahulunya merupakan sebuah kawasan Persekutuan *Limo Lo Pohalaa* karena terikat oleh lima kerajaan, yaitu Gorontalo (*Hulontalo*), Limboto (*Limboto*), Bone-Suwawa-Bintauna, Bolango – selanjutnya kedudukannya diganti Boalemo (*Baolemo*), dan terakhir Atinggola (*Andagile*),¹ kini daerah-daerah eks kerajaan tersebut telah menjadi salah satu daerah propinsi di Indonesia.² Rendahnya kedudukan Gorontalo hingga menjadi sebuah daerah otonom tentu tidak bisa dilepaskan dari dampak pendidikan.

Cerita sejarah menunjukkan bahwa sebelum pemerintah kolonial Belanda menancapkan hegemoninya yang kemudian

1. C. M. C. Baron van Hoevel, 1891. "Onder Rechtstreeksch Bestuur Is gebracht", *De Residentie Gorontalo*. Leiden: E.J. Brill, hlm. 4.

2. Gorontalo adalah provinsi yang ke 32 di Indonesia. Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada 16 Februari 2001.

mendirikan sekolah-sekolah modern, Islam telah menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan yang ada di Gorontalo. Kegiatan-kegiatan berupa dakwah dan tabligh tentang keagamaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan akhirat sudah dilakukan sejak awal abad ke-16 oleh Raja Amai. Ketika itu sebuah masjid yang disebut *Tihi Lo Hunto* telah difungsikan sebagai pusat kebudayaan Islam bagi masyarakat. Aktifitas-aktifitas para penganjur Islam memanfaatkan adat sebagai saluran dalam mengembangkan Islam, sehingga adat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Gorontalo.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Mohammad Iqbal (1951)³ menyebutkan bahwa semenjak berdiri Islam meliputi dua aspek, yaitu agama dan masyarakat politik. Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dan persoalan-persoalan dunia, tetapi mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (*syari'at*) mengatur kedua segi itu, hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan sesamanya.

Pendapat Iqbal di atas jelas bahwa Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dan persoalan-persoalan dunia, maka sudah barang tentu bidang pendidikan atau pengajaran menjadi suatu hal penting bagi Sultan Amai untuk menarik rakyatnya dari kepercayaan *alifuru*⁴ untuk menjadi penganut

3 Deliar Noer, 1982. *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, hlm. 1.

4 Alifuru adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Merupakan sistem kepercayaan yang dianut oleh penduduk pada masa itu, seperti kepercayaan terhadap laut, gunung, tanjung, kolam, pohon, dan tempat-tempat yang mengherankan dan mendahsyatkan yang mempunyai penghuni yang mereka sebut *ilah*. *Ilah-ilah* ini ada yang baik dan ada pula yang jahat. Di Gorontalo, animisme dan dinamisme masih merupakan kepercayaan sebagian kecil penduduk masa kini. Mereka menganggap bahwa mereka mendapat kekuatan dan berkat dari roh yang mendiami gunung atau tempat tertentu yang dianggap keramat, dan untuk itu mereka biasa mengadakan upacara seperti "*Monoyabo*", yaitu upacara persiapan pembukaan hutan yang dipimpin seorang "*Panggoba*" (orang yang pandai melihat bintang pada musim penanaman). A. Sigarlaki, dkk, 1982. *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*. Departemen Pendidikan

agama Islam.⁵ Dengan demikian, sistem pendidikan di Gorontalo dipengaruhi oleh kebijakan politik – awal mulanya telah dilakukan oleh Sultan Amai.

Oleh karena Amai memeluk agama Islam karena hendak mempersunting Owutango, putri Raja Palasa Ogomonjolo (Kumonjolo) maka pengetahuannya tentang Islam tentu masih sangat minim. Guna efektifnya pengajaran tentang Islam bagi rakyatnya, maka Amai mendatangkan delapan guru dari Palasa untuk bertugas membimbing penduduk agar berpedoman pada Islam.⁶ Pada masa pemerintahan raja berikutnya, yaitu Motolodulakiki – semakin memperkuat Islam sebagai pedoman hidup rakyatnya yang masih sangat kuat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Agar kebijakan politik Raja Motolodulakiki berhasil, maka ia mengutus pembesar-pembesar kerajaan ke Ternate⁷ guna mempelajari ajaran Islam.⁸

dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978.

⁵ Richard Tacco, 1935. *Het Volk Van Gorontalo: Historich Traditioneel Maatschappelijk Cultural Sociaal Karakteristiek en Economisch*. Gorontalo: Gorontalo Drukkerij, hlm. 26. Salah satu aspek dari peristiwa proses Islamisasi di Gorontalo perlu mendapat perhatian selanjutnya. Hal ini berlainan dengan umumnya kerajaan di Nusantara, seperti Gowa yang peng-Islamannya diperkenalkan melalui para mubaligh lewat raja-raja. Dapat dikatakan bahwa Gorontalo mempunyai hubungan dengan Ternate melalui unsur diplomatik kerajaan dalam proses penyebaran Islam.

⁶ S. R. Nur, 1979. *Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo Pada Masa Pemerintahan Eato 1673-1679*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, hlm. 21.

⁷ Dalam abad ke-16 Kesultanan Ternate berada dalam puncak pengaruh dan kekuasaannya yang meliputi Mindanao Selatan di Philipina, Sangir Talaud, Minahasa, Gorontalo, daerah-daerah di teluk Tomini, pulau-pulau Banggai dan Sulawesi, sebagian Sulawesi bagian Timur, Buton, Solor, Buru, Seram dan Ambon. Lihat Ibrahim Polontalo, 1990. *Nilai dan Sejarah Perkembangan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara Sejak Tahun 1928 Sampai Dengan Periode Kepemimpinan 1985-1990*. Gorontalo: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sam Ratulangi Manado., hlm. 12.

⁸ Richard Tacco, 1965. op.cit., hlm. 25. Baca juga Bernard H.M Vlekke, 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Freedom Institute dan Balai Pustaka, hlm. 95. Dapat

Pendidikan (Islam) semakin memiliki nilai lebih dan penting pada masa pemerintahan Raja Eyato (1673-1679). Masa Eyato, pendidikan telah berfungsi menjadi sarana mobilitas sosial vertikal. Sebelumnya, status sosial seseorang ditentukan oleh garis keturunan dan darah. Dengan memiliki pengetahuan (Islam) yang luas, maka seseorang dapat menduduki posisi birokrasi dalam pemerintahan kerajaan, bahkan dapat pula menggeser struktur sosial golongan *wali-wali* (keturunan bangsawan).⁹ Pendidikan Islam mengalami perkembangan setelah diperkenalkannya membaca dan menulis aksara Arab kepada penduduk dengan sistem pengajaran berupa sistem *halaqah*, yaitu murid-murid duduk melingkar mengelilingi guru tanpa adanya pembagian kelas. Tujuan utama pengajaran ini adalah agar murid memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang ajaran Islam, menghayati dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan jaman Portugis tidak bisa lepas dari institusi keagamaan dalam hal ini gereja. Misi pengembangan agama Khatolik tidak dapat dipungkiri pengaruhnya sangat dominan dalam pengembangan pendidikan pada masa Portugis. Kenyataan tersebut seperti diungkapkan oleh Said dan Affan (1987) bahwasanya pendirian sekolah-sekolah oleh Portugis tidak lain merupakan bentuk dari pola penyebaran agama Katholik. Sekolah guru yang pertama di Indonesia didirikan di

dimaklumi pula jika Motolodulakiki menoleh ke kerajaan Ternate karena kedikdayaannya sangat diperhitungkan oleh bangsa-bangsa kolonial. B.H.M Vlekke menggambarkan kedudukan kerajaan Ternate dan Tidore sebagai berikut: "Ternate and Tidore, are both very small Islands west of Halmahera but they had extended their authority over a great number of ther Islands....". Gambaran Vlekke tentang Ternate and Tidore yang merupakan pulau kecil, dan berkedudukan sebagai kerajaan (Islam) itu memperlihatkan keunggulannya dalam perjuangan bangsa di Nusantara, usaha-usahanya begitu gigih mempertahankan daerah-daerah dan kepulauan sekitarnya.

⁹ Alim S. Niode, 2007. *Gorontalo: Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press, hlm. 87-88.

penting
sa Eyato,
tas sosial
ukan oleh
getahuan
ki posisi
pat pula
eturunan
mbangan
ara Arab
a sistem
ngelilingi
ngajaran
ang baik
emudian

institusi
n agama
dominan
Portugis.
an Affan
Portugis
n agama
dirikan di

nate karena
nial. B.H.M
ore sebagai
Halmahera
Islands....".
au kecil, dan
nggulannya
egitu gigih
anata Sosial.

Maluku, Ternate oleh Gereja Khatolik.¹⁰ Meskipun Gorontalo sering mengadakan kontak dengan Ternate, namun pengaruh pendidikan Khatolik di Gorontalo dapat dikatakan tidak ada.

Sejarah pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu (1) pertama periode VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada abad ke-17 dan ke-18; (2) periode pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19; dan (3) periode Politik Etis¹¹ (*Etische Politiek*) pada awal abad ke-20 (Boone, 1996).¹² Pada zaman VOC pada abad ke-17 dan ke-18, pendidikan untuk kaum "inlanders" (penduduk tanah jajahan ditangani oleh *Nederlands Zendelingen Genootschap* atau NZG), Gereja Kristen dari Belanda yang ikut dalam misi VOC. Maskapai ini yang ikut membiayai kegiatan pendidikan, dan bukan pemerintah Belanda. Motto mereka terkenal 3G (*Gold, Gospel, Glory*). Selain itu kebanyakan kegiatan pendidikan termasuk pendirian sekolah-sekolah baru yang dikembangkan oleh VOC pada awalnya melekat berbasis agama dan dilakukan di daerah yang struktur politiknya lemah, misalnya di Ambon dan Banda.¹³ Pada masa itu pendidikan tradisional terutama berbasis agama Islam tidak tersentuh oleh VOC.¹⁴

Berbeda dengan pendidikan periode abad ke-19 atau tepatnya setelah dibubarkannya VOC pada tahun 1799,

¹⁰ Muhammad Said dan Junimar Affan, 1987. *Mendidik Dari Zaman Ke Zaman*. Bandung: Jemars, hlm. 34.

¹¹ Politik Etis adalah suatu kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan sebagai balas jasa atas keuntungan-keuntungan yang telah diperoleh di tanah jajahan. Kebijaksanaan politik baru ini dilaksanakan dengan semboyan "edukasi, irigasi, dan migrasi". Lihat M.C. Ricklefs, 1995. *Sejarah Indonesia Modern* (terj.) Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 228.

¹² Dadang Supardan, 2008. "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis" dalam *Generasi Joimpus*, Volume 1, Nomor 2, September 2008, hlm. 98.

¹³ Dedi Supriadi, (ed.), 2003. *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangan Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

yang ditandai pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda. Dibubarkannya VOC di Indonesia mendorong berubahnya sistem pemerintahan dari *Indirect Rulle ke Direct Rulle* (Sistem Pemerintahan Tidak Langsung ke Sistem Pemerintahan Langsung), hal ini otomatis membawa perubahan dimana kebijakan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels 1808, ia mengarahkan bupati-bupati di Jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah kepada anak-anak pribumi dengan suatu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama, sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak Jawa yang baik. Ironisnya, kebijakan pemerintah Belanda saat itu untuk bidang pendidikan, hingga 3,5 dasawarsa pertama pemerintah tidak menunjukkan kesediaannya untuk mengeluarkan uang bagi pendidikan masyarakat lokal.¹⁵ Sebaliknya, perhatian lebih banyak dicurahkan kepada pendidikan anak-anak Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang orang tuanya bekerja di Hindia Belanda khususnya di ELS atau *Europees Lagerschool* seperti di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Gresik. Di samping didirikan oleh pemerintah, juga didirikan oleh pihak swasta-swasta khususnya kelompok NZG yang sejak zaman VOC telah menunjukkan aktivitasnya yang tinggi dalam dunia pendidikan.¹⁶

Ketika Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dijabat oleh Rochussen, keluar Dekrit Kerajaan yang menetapkan komitmen pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah dasar bagi orang-orang pribumi yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah tersebut dinamakan *Volkschool* (Sekolah Rakyat) dengan pelajaran

15 Dadang Supardan, *op.cit.*, 98.

16 Dedi Supriadi, (ed.), *op.cit.*, hlm. 3.

i langsung
Indonesia
ari *Indirect*
Langsung
otomatis
an menjadi
udian pada
kan bupati-
lah kepada
mencakup
an tumbuh
, kebijakan
kan, hingga
enunjukkan
pendidikan
ih banyak
elanda dan
a di Hindia
chool seperti
Gresik. Di
n oleh pihak
sejak zaman
nggi dalam

dijabat oleh
menetapkan
an sekolah-
enggunakan
lah tersebut
n pelajaran

utamanya adalah menulis, membaca dan berhitung tingkat rendah. Terdapat hal positif dari perkembangan pendidikan pada zaman ini sekalipun perkembangannya lambat. Sekolah Raja (*Hoffdenschool*) yang bertujuan menyiapkan calon pegawai negeri (*ambtenaar*) baru didirikan di Tondano, Sulawesi Utara, kemudian di Bandung, Magelang dan Probolinggo. Aspek positif lainnya adalah tingginya persyaratan untuk menjadi guru seperti tampak dari lamanya pendidikan di sekolah guru. Sebagai contoh untuk guru TK atau *Froebelschool* lamanya pendidikan 9-10 tahun; untuk guru SR Sekolah Rakyat maupun HIS (*Hollands-Inlandse Kweekschool*), KCK, EKS, dari 7-10 tahun, untuk guru SLTP/SLTA, sekolah-sekolah *Hoofdacte & Hogeracte Cursus* lamanya dari 5-17 tahun.¹⁷

Dengan demikian, awal abad ke-20, arah kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda mengalami perubahan mendasar yang dipengaruhi oleh kondisi politik negeri induk (Belanda). Di negeri Belanda terjadi perdebatan yang alot antara partai-partai politik akibat eksplotasi terhadap negeri jajahan, sehingga menimbulkan pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan di Hindia Belanda. Tiga partai agama—Partai Roma Katolik, Partai Anti Revolusioner, dan Partai Kristen Historis—programnya menitikberatkan pada agama, kerja bebas, dan kewajiban moral dari negeri induk. Demikian pula Partai Sosialis banyak menuntut perbaikan kolonial diantaranya politik kolonial seharusnya meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi, evolusi ekonomi, bukan eksplotasi kolonial melainkan pertanggungjawaban moral.¹⁸

Selain kedua partai tersebut, kecaman-kecaman juga

¹⁷ Dadang Supardan, *op.cit.*, hlm. 100.

¹⁸ Sartono Kartodirdjo, 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 30-31.

dilancarkan dari kelompok Etis melalui beberapa tulisan diantaranya novel "Max Havelaar" karangan Douwes Dekker atau Multatuli yang menentang praktek tanam paksa di daerah Lebak, dan Baron van Hoevel mengkritik penyelewengan tanam paksa. Begitupula C. Th. van Deventer merupakan tokoh utama politik etis atau politik balas budi, menerbitkan artikel berjudul "*Een eereschuld*" atau "suatu utang kehormatan" di dalam jurnal Belanda *de Gids*. Dalam tulisannya dinyatakan bahwa negeri Belanda berutang kepada penduduk pribumi Hindia Belanda dari semua kekayaan yang telah dieksplotasi. Utang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan pribumi dalam kebijakan kolonial. Kritik van Deventer mendapat tanggapan dari pemerintah Belanda. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa, dan kemudian Ratu Belanda tersebut dalam pidatonya mengemukakan gagasan pembaharuan politik yaitu "*Etische Richting*" atau "Haluan Etika" atau dikenal dengan politik Etis. Politik Etis melahirkan tiga prinsip yang dianggap dasar kebijakan baru yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk.¹⁹ Pendidikan di Gorontalo mengalami perkembangan pada masa ini, setelah disetujuinya Politik Etis. Brugmans menyatakan, pendidikan bukan hanya bagian dari politik pemerintah Belanda, tetapi merupakan inti dari politik pemerintah Belanda.²⁰

Sebagai orang-orang yang ingin terus berkuasa di kepulauan Nusantara, bagi orang-orang Belanda masalah yang pokok adalah bagaimana menimbulkan perasaan senang hati di kalangan orang-orang Indonesia terhadap

19 M.C. Riklefs, 2009. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, hlm. 327-328.

20 S. Nasution, 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 15-16.

sa tulisan
Douwes
ek tanam
engkritik
Deventer
alas budi,
au "suatu
ds. Dalam
berutang
ri semua
sebaiknya
tas utama
nial. Kritik
h Belanda.
kan suatu
kemudian
emukakan
ting" atau
Politik Etis
jakan baru
enduduk.²⁰
gan pada
Brugmans
ari politik
ari politik
rkuasa di
a masalah
perasaan
a terhadap

a: PT. Serambi
ra, hlm. 15-16.

pemerintahan Belanda. Dalam hal ini menurut Deliar Noer terdapat dua macam pandangan. Pertama mengandung unsur budaya, namun masalahnya adalah bagaimana mengembangkan kebudayaan Barat hingga orang Indonesia menerima kebudayaan ini sebagai kebudayaan mereka, walaupun tanpa mengesampingkan kebudayaan sendiri. Cita-cita seperti ini yang disebut "*assosiasi*" mengandung maksud untuk "mengikat jajahan lebih erat pada penjajah dengan menyediakan bagi penduduk jajahan itu manfaat-manfaat yang terkandung dalam kebudayaan pihak penjajah dengan menghormati sepenuhnya kebudayaan asal (penduduk).²¹

Pandangan kedua ialah bagaimana mengubah agama penduduk, yang Islam maupun yang bukan menjadi Kristen. Pandangan ini tidak perlu dilihat sebagai suatu pendapat yang ingin membangun rohani penduduk Indonesia, melainkan lebih banyak berhubungan dengan maksud semula di atas, yaitu memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Missi (Kristen) sendiri berpendapat bahwa bila pandangan pertama tadi dapat dipenuhi, maka mereka sendiri pun "akan lebih dapat mengusahakan agar mereka lebih diterima penduduk yang dari segi kebudayaan itu telah berasimilasi. Sebaliknya, pertukaran agama penduduk menjadi Kristen menguntungkan tanah air (Negeri Belanda)" pula. Oleh karena penduduk pribumi yang mengenal eratnya hubungan agama dengan pemerintahan, setelah masuk Kristen akan menjadi warga-warga loyal lahir batin bagi Kompeni, sebutan yang diberikan administrasi Belanda itu.²²

20. *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, hlm. 67. Hurgronye mengatakan, "Pemecahan yang sebenarnya dan satu-satunya yang merupakan pemecahan tentang masalah Islam itu terletak pada asosiasi orang Islam (yang terdapat di dalam jajahan Belanda) dengan orang-orang Belanda. Lihat karangannya, *Nederland en de Islam* (Leiden: F.J. Brill, 1915), hlm. 38, dalam Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 27-28.

21. *Ibid.*, hlm. 28.

BAB II

PENDIDIKAN TRADISIONAL

A. Masa Pra Islam

Sebelum masuknya pengaruh Islam, penduduk yang mendiami daerah Gorontalo⁷² hidup di daerah pegunungan dan secara perlahan penduduk menempati dataran rendah dalam tata kehidupan yang semakin teratur dan terpimpin. Mereka awalnya hidup dalam lingkungan keluarga batih (*ngalaa*), dari beberapa *ngalaa* membentuk unit-unit kelompok keluarga di sebut *laihe*. Dalam kelompok *laihe* diangkat seorang

72 Istilah kata Hulontalo berasal dari kata Huluntulangi, kemudian mengalami proses perubahan menjadi Hulontalangi artinya lembah mulia yang terletak di bagian selatan Gunung Tilongkabila. Sejak kedatangan Kolonial Belanda, kata Hulontalo berubah menjadi Gorontalo akibat sulit diucapkan bagi orang Belanda. Awal mula yang mendiami daerah Gorontalo adalah Humonggihulo didampingi istrinya Lijaningo beserta tiga orang anaknya dan para pengikutnya. Baca M.H Lipoeto, 1947. *Sedjarah Gorontalo, Doea Lima Pohalaa*, V. Gorontalo: Volks Drukkerij, hlm. 13-14. Pada bagian lain dalam tradisi lisan dikatakan bahwa proses terbentuknya penduduk lokal Gorontalo dimulai dari Yadi Pulu Milato yang menetap di Gunung Buliohuto. Dalam perjalanannya ke Gunung Tilongkabila ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yadi Pulu Ilato, dari pertemuan itu kemudian mengawininya. Hasil perkawinannya dikaruniai empat orang anak yaitu Matolodula, Tolangohula, Tumuhulawa, dan Tinelo Bulio. Dalam perkembangan kehidupan selanjutnya, mereka berpisah untuk mencari daerah-daerah baru di sekitar pegunungan tersebut. Baca secara keseluruhan S.R. Nur, 23 Januari 1992. *Ikilale Lo Bate Wala* (Ikrar Delapan Kepala Adat) Kerajaan-Kerajaan Gorontalo. Ujung Pandang: tanpa penerbit. Pada prinsipnya, tradisi lisan yang hidup dalam masyarakat Gorontalo mempunyai kemiripan, intinya secara keseluruhan bermuara pada proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di daerah Gorontalo.

pemimpin melalui musyawarah, kepemimpinan dijabat seorang anggota tertua, berwibawa dan berpengalaman serta menjamin keamanan dan ketertiban setiap *ngalaa*. Pemimpin *laihe* tersebut dinamakan *pulo laihe* yang artinya orang yang paling utama di *laihe*.⁷³ Kelompok-kelompok *laihe* berkembang dan membentuk satu komunitas masyarakat disebut *lemboa*. Di lingkungan *lemboa* terdapat seorang pemimpin disebut *bantalo*. Beberapa *lemboa* inilah mempunyai ikatan dan membentuk satu-kesatuan sosial yang lebih besar disebut *linula* di bawah kepemimpinan seorang *olongia* dan merupakan satu kesatuan sosial ekonomi.

Peranan lingkungan alam mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan pola pemukiman penduduk. Perkembangan pengetahuan penduduk tentang hubungan komunikasi melalui pola aliran Sungai Bone dan Bolango memberikan kecenderungan penduduk memanfaatkan sungai-sungai sebagai prasarana lalu lintas utama. Peranan dan fungsi sungai dan kemudian berkembang pada pengetahuan maritim, menyebabkan pantai maupun sungai semakin penting dapat menarik penduduk Gorontalo dengan mengembangkan pemukiman ke arah tersebut. Pada mulanya bersifat memanjang dan mengelompok sesuai dengan kemudahan yang tersedia oleh alam, artinya pemilihan lokasi pemukiman tidak disertai dengan usaha penaklukan alam lebih dahulu. Lokasi pemukiman berpola mengelompok dan memanjang serta saling berhubungan mengikuti alur sungai, danau Limboto dan pesisir pantai.

Pengetahuan penduduk Gorontalo melalui pemukiman mengelompok minimal dapat menghalau setiap ancaman dari luar. Sehubungan dengan adanya interaksi melalui hubungan antara kelompok-kelompok *linula*, kemudian timbul pemikiran

⁷³ M.H. Lipoeto, *op.cit.*, hlm. 35.

para *olongia* untuk mempersatukan *linula*. Pengetahuan terwujud berkembang dan membentuk kelompok yang lebih besar dalam satu kerajaan. Dalam tradisi lisan (*oral tradition*) Gorontalo dikatakan bahwa asal mula kerajaannya dibentuk melalui persekutuan 17 rumpun komunitas kecil disebut *linula*. Setiap kelompok *linula* dipimpin seorang *olongia*, kemudian berintegrasi ke dalam satu kerajaan (*lipu Hulontalo*) di bawah kekuasaan Raja Wadipalapa atau Ilahudu – *olongia* dari *linula* Hulontalangi – sekitar tahun 1385.⁷⁴ Di antara tujuh belas *linula*, Hulontalangi adalah *linula* yang terbesar dengan *olongia* pertama yang tercatat dalam laporan arsip adalah Halawadula (Ilahudu), kemudian mengawini Tantanghula (Tulanggehula) sebagai *Olongia* Limutu (Limboto).⁷⁵

Pengetahuan paling menonjol ialah dari segi sistem kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakat pendukungnya. Demikian pula kepada orang yang meninggal diberikan penghormatan dan persajian melalui upacara-upacara untuk mengantar arwah atau roh ke tempat dunia arwah. Pada penguburan dilakukan di sekitar kediamannya, bagi orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat diadakan upacara penguburan dengan memberikan bekal kubur. Jenis penguburan ini terdapat di Olohuta, Kabupaten Bone Bolango. Hasil ekskavasi ditemukan empat kerangka manusia, bekal kubur berupa gerabah, fragmen-fragmen cawan, periuk, sisa tuangan logam, tulang-tulang binatang, cangkang, moluska dan gelang berbahan tulang.⁷⁶

74 B. J. Haga, *op.cit.*, hlm. 5. Baca G. J. F. Riedel, 1870. "Het landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile", dalam *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde*, XIX, hlm. 66. Baca juga M. H. Lipoeto, *op.cit.*, hlm. 19.

75 J. Paulus, 1917. "Gorontalo" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 805.

76 Hasil ekskavasi Balai Arkeologi Manado, tahun 2009.

pengetahuan
yang lebih
(*al tradition*)
dibentuk
cil disebut
ng *olongia*,
(*Hulontalo*)
lu - *olongia*
ntara tujuh
sar dengan
sip adalah
antanghula
75

egi sistem
ng terhadap
tukungnya.
diberikan
cara untuk
wah. Pada
bagi orang
t diadakan
tubur. Jenis
ne Bolango.
usia, bekal
periuk, sisa
g, moluska

pen Holontalo,
Tijdschrift van
e, XIX, hlm. 66.

sch Indie, eerste

Sebelum agama Islam masuk dan mempengaruhi sistem kepercayaan, masyarakat Gorontalo menganut kepercayaan *alifuru* yaitu sebuah kepercayaan terhadap roh-roh orang yang telah mati dan juga percaya kepada benda-benda keramat yang dianggap sebagai prototipe Tuhan.⁷⁷ Dalam keyakinan masyarakat Gorontalo yang menganut agama *alifuru*, mereka meyakini bahwa orang yang telah meninggal dianggap sebagai yang maha tinggi, menentukan nasib dan mengontrol perbuatan manusia. Kemudian pemujaan semacam ini lalu berkembang menjadi penyembahan roh-roh.

Roh orang yang meninggal dianggap dan dipercayai mereka sebagai makhluk kuat yang menentukan, segala kehendak serta kemauan yang harus dilayani. Mereka juga beranggapan roh tersebut juga dapat merasuk ke dalam benda-benda tertentu. Roh yang masuk ke sebuah benda akan menyebabkan kesaktian atau kesakralan benda tersebut. Penyembah pada roh-roh tersebut dengan harapan supaya selamat dari bahaya.

Bentuk pengetahuan tentang kepercayaan *alifuru* sampai saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Gorontalo seperti yang terkandung dalam tarian *Modayango*⁷⁸ - di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa; dan di Desa Bionga Kecamatan Limboto. Tarian *modayango* adalah tarian daerah Gorontalo yang sampai saat ini membawakan bentuk dan wataknya yang telah berlangsung sekian abad lamanya. Tarian ini memiliki sifat-sifat animistis, karena diperuntukkan untuk menghormati roh-roh nenek moyang dengan cara menari-nari sampai lupa diri. Sering pula tarian ini diadakan untuk mengundang roh-roh nenek moyang mereka dalam

⁷⁷ Ibrahim Polontalo, 1998. "Masuk dan Berkembangnya Islam di Gorontalo", dalam *Makalah*. Gorontalo: STIKIP Gorontalo, hlm. 4.

⁷⁸ Ibrahim Polontalo, 1968. *Peranan Tidi Lo Polopalo Gorontalo dalam Pembinaan Kepribadian Suku Gorontalo*. Gorontalo: tanpa penerbit, hlm. 8.

menghadapi bermacam-macam masalah. Tarian *modayango* diyakini bagi penganutnya dapat mengobati berbagai macam penyakit, memperbaiki nasib, dan lainnya. Karena kegunaan tarian ini begitu penting maka sampai saat ini masih ada orang-orang tua yang mempertahankannya sebagai tarian yang religius. Namun tarian yang bersifat animistik itu secara perlahan mulai ditinggalkan oleh pengikutnya, setelah agama Islam mulai berkembang di kalangan masyarakat Gorontalo.⁷⁹ Di samping tarian *modayango*, terdapat pula tarian yang oleh sebagian masyarakat Islam Gorontalo dianggap sebagai bentuk tarian pemujaan kepada setan yaitu tarian *tidi*.⁸⁰

Mengenai tarian *tidi* terdapat berbagai pemahaman tentang makna tarian tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa tarian *tidi* bisa digali kembali dengan prinsip bahwa *tidi* adalah hak mutlak bagi para keturunan raja-raja dan bangsawan. Menurut aliran ini bahwa orang tua yang telah meninggal masih berhak untuk diadatkan karena termasuk orang *Jilowadi* (orang turunan). Demikian pula dalam hal perkawinan, masih ada pendapat yang sama bahwa si pengantin karena mempunyai garis keturunan raja atau bangsawan, maka ia harus mengadakan dan memainkan tarian *tidi lo polopalo*. Beberapa pendapat mempunyai pandangan lain, bahwa tarian ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan unsur pendidikan dalam *tidi lo polopalo* yang hanya digunakan dari golongan atas. Aliran kedua tidak menyukai penggalan kembali *tidi* atau tarian Gorontalo, karena mereka berpendapat

79 S.R. Nur, 1965. *Masyarakat Hukum Gorontalo*. Makassar: Yayasan Penerbitan Universitas Hasanuddin, hlm. 8.

80 Pada masa pemerintahan Raja Amai, tarian *tidi* telah mengalami perubahan makna dan menjadi media pendidikan bagi masyarakat Gorontalo. Tarian *tidi* mengandung nilai-nilai Islam antara lain bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dan kewajiban yang sama sederhana tanpa ada perbedaan kasta dan golongan serta mengabdikan diri kepada sesamanya. Ibrahim Polontalo. *op.cit.* hlm. 14.

modayango
ai macam
gunaan
asih ada
ai tarian
itu secara
ah agama
rontalo.⁷⁹
yang oleh
sebagai
di.⁸⁰
tentang
an bahwa
tidi adalah
ngsawan.
meninggal
ng Jilowali
rkawinan,
tin karena
a, maka ia
o polopalo.
n, bahwa
agan unsur
nakan dari
penggalian
erpendapat

san Penerbitan
ami perubahan
rontalo. Tarian
ebagai makhluk
an yang sama,
ngabdikan diri

bahwa tarian *tidi* mempunyai kemiripan dengan tarian *modayango* (tarian pemujaan kepada roh-roh atau setan) yang terang-terangan bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran ini dipelopori oleh masyarakat Islam yang sudah mendalami ajaran agamanya, karena menurut mereka tarian *tidi* bersifat syirik. Sementara aliran ketiga berpendapat bahwa tarian *tidi* adalah kesenian daerah yang merupakan unsur kebudayaan yang hakiki dan mencerminkan kepribadian dan landasan hidup suku Gorontalo. Memang tarian *tidi* pada saat lahirnya mengandung dan memperlihatkan adanya unsur dinamisme karena benda pegangannya dianggap bertuah. Benda ini disebut "*tabongo*" atau alat penolak bala atau bahaya yang diambil dari semacam tumbuhan.⁸¹

B. Pengaruh Islam

Agama Islam⁸² membawapembaharuansecara fundamental

⁷⁹ *Ibid.* hlm 17-18

⁸⁰ Masuknya agama Islam di Gorontalo yang diawali dengan keislaman Raja Amai terdapat dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa terjadi pada tahun 931 H atau tahun 1524 M. Untuk pendapat kedua menyatakan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 899 H atau 1495 M. Pendapat kedua dipegang oleh pihak kerajaan sesuai dengan yang tertulis di pintu gerbang masuk Masjid Hunto Sultan Amai -- di Kelurahan Biawu, Gorontalo. Masjid didirikan tidak lama setelah Raja Amai dan rombongan tiba di Gorontalo. Baca Sirajuddin Ismail. Januari 2008. "Peran Para Sultan dalam Penyebaran Islam di Gorontalo", dalam *Jurnal Al Qalam*, No.XXI. Makassar: Balitbang Departemen Agama, hlm. 60. Sejak saat itu, Raja Amai melaksanakan amanah untuk mengislamkan masyarakat Gorontalo dan menjadikan Islam sebagai sendi dari adat istiadat masyarakat Gorontalo. Selanjutnya Raja Amai diberi gelar *to lao pamaklumu* dan pada saat itu diberi pula gelar *tulutani* (sultan), karena beliau sebagai raja Islam pertama di Gorontalo. Secara umum proses Islamisasi di Kerajaan Gorontalo berlangsung secara damai tanpa sedikit pun jalan kekerasan. Rakyat menerima Islam tanpa ada gesekan yang berarti, rakyat secara sukarela meninggalkan kepercayaan lama yang dinamakan *alifuru*. Masuknya agama Islam, raja dan rakyat Gorontalo tidak lagi melakukan penyembahan terhadap benda-benda keramat yang dianggap sebagai prototipe Tuhan. Penyebaran Islam di Gorontalo bersifat *top down* artinya karena Islam menyebar akibat peran besar dari penguasa yang selanjutnya diterima secara massif oleh rakyatnya. Baca Abd. Kadir R. Juli 2000. "Pertautan Adat dan Syara' dalam Dimensi Sosial Di Kota Gorontalo",

terhadap sistem pendidikan dan pengetahuan budaya tulis di Gorontalo. Pada tahun 1560, Raja Amai memeluk agama Islam dan merupakan peletak dasar Islamisasi di Gorontalo setelah melakukan perkawinan dengan Owutango -- putri Raja Palasa Ogomonjolo (Kumojolo) di Siyendeng, Tomini yang mempunyai pertalian darah dengan Raja-Raja Ternate.⁸³ Raja Amai melakukan pembaharuan dalam kerajaan dengan mengembangkan prinsip adat dan kebiasaan masyarakat disesuaikan dengan ajaran Islam.⁸⁴ Oleh karena itu, Raja Amai mendatangkan delapan guru yang juga raja-raja kecil di bawah *vasal* Palasa yaitu Tamalate, Lemboo, Siyendeng, Hulangato, Siduan, Sipayo, Songinti dan Bunuyo. Mereka bertugas membimbing penduduk serta merancang adat istiadat yang berpedoman pada Islam.⁸⁵

Mereka membagi tugas sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimilikinya, seperti Raja Tamalate, Lemboo, Siyendeng dan Hulangato ditugaskan merancang adat-istiadat yang akan diberlakukan pada masyarakat Gorontalo. Selain itu, Raja Tamalate dan Siyendeng juga mengajarkan tentang cara pembuatan peralatan rumah tangga seperti *tolu*, tutup saji dan pembuatan garam dapur. Demikian pula bagi Raja Siduan, Sipayo, Songinti dan Bunuyo bertugas mengajarkan

dalam *Jurnal Al Qalam*, Volume XVI No. 26. Makassar: Balitbang Departemen Agama, hlm. 217.

83 Richard Tacco. 1935. *Het Volk Van Gorontalo: Historich Traditioneel Maatschappelijk Cultural Sociaal Karakteristiek en Economisch*. Gorontalo: Gorontalo Drukkerij, hlm. 26. Salah satu aspek dari peristiwa proses Islamisasi di Gorontalo perlu mendapat perhatian selanjutnya. Hal ini berlainan dengan umumnya kerajaan di Nusantara, seperti Gowa yang peng-Islamannya diperkenalkan melalui para mubaligh lewat raja-raja. Dapat dikatakan bahwa Gorontalo mempunyai hubungan dengan Ternate melalui unsur diplomatik kerajaan dalam proses penyebaran Islam.

84 *Ibid.*

85 S. R. Nur, 1979. *Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo Pada Masa Pemerintahan Eato 1673-1679*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, hlm. 21.

budaya tulis
meluk agama
di Gorontalo
ngo -- putri
eng, Tomini
aja Ternate.⁸³
ajaan dengan
masyarakat
u, Raja Amai
ecil di bawah
g, Hulangato,
ka bertugas
istiadat yang

bidang dan
late, Lemboo,
adat-istiadat
ontalo. Selain
rkan tentang
ti tolu, tutup
ula bagi Raja
mengajarkan

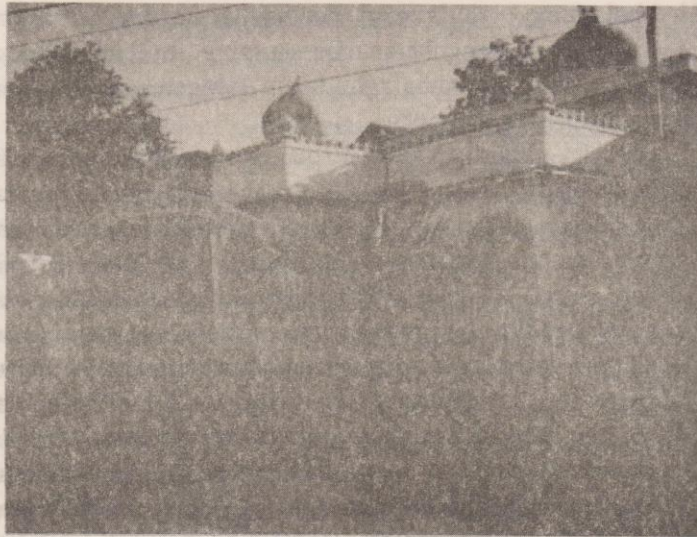
bang Departemen
rich. Traditions-
misch. Gorontalo
a proses Islamisasi
berlainan dengan
peng-Islaman
dikatakan bahwa
unsur diplomasi

sem Gorontalo
sitas Hasanudin

hal-hal yang berhubungan dengan mantera-mantera dan dukun dalam pengobatan. Di samping itu, mereka juga bertugas sebagai muballigh dalam pengembangan ajaran Islam pada masyarakat.⁸⁶

Mereka diberikan lokasi pemukiman tersendiri oleh Raja Amai di daerah Hunto (Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan sekarang). Di daerah tersebut juga didirikan sebuah tempat ibadah yang disebut *Tihi Lo Hunto* (Mesjid Sultan Amai sekarang). Bangunan inilah menjadi pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan Islam bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan berupa dakwah dan tablig tentang keagamaan-kemasyarakatan dalam hubungan dunia dan akhirat. Demikian pula dalam aktifitasnya mulai memperkenalkan dan mengembangkan prinsip adat dan kebiasaan yang berlaku pada kerajaan dengan cara ajaran Islam, sehingga adat memegang peranan penting dalam saluran Islamisasi. Untuk menghormatinya, delapan raja-raja kecil Palasa diberi gelar *Olongia walu lonto otolopa*.

⁸⁶ Tahir A. Ghu, 1971. "Adat Istiadat di Kampung IV Kecamatan Pagau" dalam *Hasanudin Seminar Adat Gorontalo*. Limboto, hlm. 1.



Gambar 1. Masjid Amai sebelumnya dikenal *Tihi Lo Hunto*, merupakan masjid pertama di Gorontalo yang berfungsi sebagai pusat penyebaran pendidikan dan kebudayaan Islam di Gorontalo.

Kerajaan mulai menetapkan pentingnya adat istiadat disesuaikan dengan syari'ah Islam, hasil rumusan ini dikenal dengan prinsip "*saraa topa-topango to adati*" artinya syarah bertumpu pada adat. Paderancangan adat yang dibuat Raja Amai bersama delapan raja-raja kecil tersebut telah menghasilkan suatu rumusan adat sebanyak 185 adat yang diberlakukan.⁸⁷ 113 butir diantaranya masih dilakukan masyarakat hingga sekarang, 24 butir berkaitan dengan upacara perkawinan, 21 butir berkaitan dengan kematian, dan selebihnya berkaitan dengan berkeluarga, bermasyarakat, penerimaan tamu, dan penobatan pemimpin.⁸⁸ Prinsip-prinsip adat itu menjadi

87 S. R. Nur, 1979. *op.cit.*, hlm. 301.

88 Alim S. Niode, *op.cit.*, hlm. 87.

pegangan utama serta hubungannya kehidupan Islami.

Pada masa pembesar kerajaan Ternate, sehingga ditekankan pada berhasil mengemb sosialisasi Islam di diberlakukannya *saraa hula-hula to adati*), artinya hula kedudukan yang s

Kemajuan pemerintahan Ey penghargaan tin dengan pendidikan kecenderungan me (keturunan bangsa dari garis darah da pembaharuan deng ahlak bisa mendu dalam kerajaan.⁹⁰

Pembesar keraj bagi kehidupan ra selain membawahi pengembangan aja tugas-tugasnya, Ka 4 *saradas*, dan 2 *hati* mengurus kegiatan

89 Richard Tacco, *op.cit.*

90 Alim S. Niode, *op.cit.*

peran utama dalam menjalankan pemerintahan kerajaan serta hubungannya dengan masyarakat yang berpola pada kehidupan Islami.

Pada masa pemerintahan Motolodulakiki, mengutus pembesar kerajaan untuk mempelajari ajaran Islam di Ternate, sehingga dalam ajaran Islam tersebut lebih ditekankan pada ajaran *tauhid* dan *ma'rifat*. Motolodulakiki berhasil mengembangkan proses Islamisasi dan memperluas sosialisasi Islam di tengah masyarakat. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya hukum adat dalam "*adati hula-hula to saraa, saraa hula-hula to adati*" (adat bersendi saraa, saraa bersendi adat), artinya hukum adat dan hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama.⁸⁹

Kemajuan pendidikan Islam berlangsung pada masa pemerintahan Eyato (1673-1679). Raja Eyato memberi penghargaan tinggi terhadap pendidikan, sehingga dengan pendidikan dapat mengangkat status sosial dan kedudukan menggeser struktur sosial golongan *wali-wali* (kemaman bangsawan). Sebelumnya status sosial ditentukan dengan garis darah dan keturunan. Eyato kemudian melakukan pemerintahan dengan dasar utama pendidikan, agama, dan ketertarikan menduduki posisi dalam birokrasi pemerintahan kerajaan.⁹⁰

Pembesar kerajaan yang mengatur urusan keagamaan masyarakat rakyat dijabat oleh *Kadli*. Tugas-tugasnya yaitu membawahi pengadilan agama, juga membawahi pengembangan ajaran keagamaan. Untuk memperlancar tugas-tugasnya, *Kadli* dibantu oleh 2 *hakimu* (hakim), 4 imam, 2 *mufti*, dan 2 *katibi* (chatib). Tugas-tugas imam dan *saradaa* sebagai kegiatan keagamaan utamanya pengajaran agama

⁸⁹ Husein Ternate, *op.cit.*, hlm. 25.

⁹⁰ Husein Ternate, *op.cit.*, hlm. 87-88.

BAB III

PENDIDIKAN MASA KOLONIAL BELANDA

A. Kegiatan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC)

Setelah merosotnya kekuasaan Gowa dan Ternate akibat kontrak Perjanjian Bungaya 18 November 1667. Penetapan kontrak Gowa dan Ternate pada intinya menguntungkan pihak VOC, sehingga VOC berhasil mengikat Gowa dan Ternate dengan memperluas kepentingan politiknya untuk menguasai negeri-negeri yang telah dikuasai kedua kerajaan tersebut. Berawal dari peristiwa inilah VOC menempatkan Gubernurnya di Ternate (Kepulauan Maluku) untuk lebih mempermudah mengatur kekuasaannya atas negeri-negeri di bawah pengaruh Gowa dan Ternate.⁹⁷ Runtuhnya

⁹⁷ Setelah merosotnya kekuasaan Ternate tahun 1650 akibat perpecahan di dalam tubuh kerajaan menyebabkan Raja Mandarsyah diturunkan tahtanya dalam suatu kudeta. Selanjutnya Mandarsyah meminta perlindungan kepada VOC untuk mengembalikan tahtanya. Campur tangan VOC mengakibatkan timbulnya konflik antara Ternate dengan VOC yang berkepanjangan dan pada akhirnya VOC berhasil menguasai Ternate tahun 1673. Lihat M. C. Ricklefs, op.cit., hlm. 96-97. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Bungaya 18 November 1667, beberapa orang Makassar meninggalkan negerinya menuju daerah-daerah yang pernah dibawah pengaruh Gowa, termasuk Gorontalo dan Limboto pada tahun 1634. Lihat Andi Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis, Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alfabeta, hlm. 56-57. Perjanjian Bungaya bagi orang Belanda disebut *Het Bongavische Verdrag* dan Makassar disebut *Cappaya ri Bungaya* ditandatangani oleh Karaeng Popo atas nama Kerajaan Gowa dan Speelman atas nama Kompeni Belanda. Perjanjian tersebut membawa Gowa dalam suasana peralihan yang sangat mencemaskan. Untuk mengetahui lebih jelas isi Perjanjian Bungaya

kesepakatan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya atau sarjana akan kembali ke Gorontalo untuk dapat menyumbangkan ilmu masing-masing bagi kemajuan daerah.

F. Sekolah Menengah Terpadu

1. MAN Insan Cendikia Gorontalo

Sekolah Menengah Umum Insan Cendikia merupakan salah satu sekolah unggulan yang dinamis. Sekolah ini diprakarsai Prof. Dr. Ing. Baharuddin Jusuf Habibie di tahun 1995 yang saat itu sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) dibawah pengawasan dan pengelolaan Lembaga Riset dan Teknologi dengan program pendidikan *Sains and Technology Equity Program – STEP* (Program Penyetaraan Sains dan Teknologi) yang diterapkan untuk model sekolah lingkungan pondok pesantren. Lembaga pendidikan tersebut diharapkan mampu memberikan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sekaligus berlandaskan Iman dan Taqwa (IMTAQ) khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Perekrutan tenaga pengajar serta calon murid kala itu ditempatkan di Serpong

Gorontalo 1955-1965. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam MUBES V bulan Pebruari tahun 1999 diputuskan untuk merubah struktur organisasi yang semula berbentuk presidium menjadi Pengurus Besar (PB) HPMIG, dan tiap HPMIG sebagai cabang. MUBES V juga menghasilkan keputusan yang menjadi salah satu peristiwa penting bagi masyarakat Gorontalo yakni pemekaran dari Propinsi Sulawesi Utara dan membentuk wilayah otonom sendiri Propinsi Tomini yang kemudian menjadi bakal berdirinya Propinsi Gorontalo. Dalam upaya mensosialisasikan keputusan tersebut, PB HPMIG yang kemudian dibentuk mengadakan demonstrasi di MPR pada bulan Desember 1999. Kemudian masalah pembentukan Propinsi Gorontalo menjadi isu nasional yang dimuat berbagai media massa nasional dan lokal.

tkan perubahan dalam
ndengan relasi sosial dalam
bungan kekuasaan dalam
mempengaruhi perubahan
utan. Hal ini sesuai dengan
gan status kekuasaan dapat
tribusi dalam relasi sosial.
al merupakan perwujudan
an ekonomi, politik, dan
bahwa perubahan sosial
sosial ekonomi tetapi juga
yarakat untuk melakukan

tiken di Gorontalo masih
jukan penelitian lanjutan
idikan di Gorontalo secara

bahan untuk melengkapi
ti sosial di Indonesia yang

di acuan bagi kebijakan
bilan keputusan untuk
kan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Bundel Ternate, *Kontrak Gorontalo* 31 Desember 1819. Nomor 131.

Indisch Staatsblad. No. 28 a.

Indisch Staatsblad Tahun 1935, No. 125.

Politiek Verslag van het Residentie Manado over het eerste halfjaar 1936 dan 1938, bundle MvO 4e.

Sumber Arsip Yang Diterbitkan

Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1971. *Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig Overzicht van Nederlandsch Indië, 1837)*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 4, Jakarta: ANRI.

_____. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5, Jakarta: ANRI.

Rebus, J. 1917. "Gorontalo" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel*. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Reidel, G.J.F. 1870. "Het landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile", dalam *TBG*, Vol. XIX.

Artikel/Buku

_____. 1971. *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera 1927-1933*. New York: Cornell Modern Indonesia Project.

_____. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 1985. "ke Arah Penulisan Sejarah Nasional di Tingkat Lokal" dalam *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan: Suatu*

Sejarah Pendidikan di Gorontalo

Gorontalo pernah melalui suatu masa yang sangat dinamis, ketika terlibat dalam hubungan lintas teritorial dan interaksi lintas budaya. Pendidikan telah membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Masuknya agama Islam membawa pengaruh penting dalam kerajaan. Pendidikan Islam telah berfungsi menjadi sarana mobilitas sosial yang vertikal. Kehadiran Pemerintah Belanda menyediakan sekolah-sekolah guna memenuhi kebutuhan tenaga pemerintahan yang rendah. Dibukanya HIS dan sekolah Desa memberi pengaruh besar terhadap pemikiran-pemikiran baru tentang nasionalisme. Para pelajar telah menamatkan HIS, melanjutkan pendidikannya di luar Gorontalo. Muncullah hubungan interaksi antar sesama pelajar khususnya di Jawa untuk melakukan perlawanan bercorak pergerakan nasional. Demikian pula sistem pendidikan yang diterapkan berdasarkan diskriminasi dan pendidikan barat mendorong Muhammadiyah untuk meningkatkan pendidikan bagi pribumi. Selain itu, penyeragaman pendidikan yang diterapkan pendudukan Jepang tanpa melihat status sosial memberi peluang penduduk untuk mendapatkan pendidikan. Setelah kemerdekaan, pendidikan mengalami pasang surut akibat pergolakan politik, namun kemudian mengalami peningkatan setelah dibukanya sekolah-sekolah menengah. Banyaknya tamatan sekolah menengah menjadi permasalahan karena belum dibukanya perguruan tinggi. Para pelajar melanjutkan pendidikan di kota-kota besar yang telah maju pendidikannya. Mereka inilah yang nantinya menjadi orang penting yang perubahan-perubahan sosial dan politik yang mewarnai aspek kehidupan masyarakat Gorontalo. Munculnya elite baru dalam masyarakat setelah kembalinya kaum terpelajar memegang jabatan-jabatan penting dalam birokrasi, dan akademisi. Sebagian besar mendorong dibukanya perguruan tinggi di Gorontalo, dan pendidikan di Gorontalo semakin lebih dinamis.



Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta

ISBN 978-602-9374-55-1

